

**ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI,
KETERBUKAAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI
PULAU JAWA TAHUN 2010-2019**

***ANALYSIS FISCAL DECENTRALIZATION, ECONOMIC GROWTH, ECONOMIC
OPENNESS, HUMAN DEVELOPMENT INDEX, AND UNEMPLOYMENT RATE ON
DEVELOPMENT INEQUALITY IN JAVA ISLAND 2010-2019***

¹⁾Darul Awaludin, ²⁾Hadi Sasana, ³⁾Jalu Aji Prakoso

¹²³ Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email: Darulawaludin93@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan pembangunan terjadi dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, Keterbukaan ekonomi dari segi nilai ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Keterbukaan ekonomi dari segi nilai investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran.

Abstrack

Inequality in development occurs due to differences in the potential of natural resources and differences in demographic conditions in each region. The purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization, economic growth, economic development, human development index, and the level of impact faced in Java Island in 2010-2019. The data used in this research is secondary data. The method in this study uses panel data regression analysis. The results of the analysis in this study indicate that partially fiscal decentralization has a positive and insignificant effect on development in Java, economic growth has a positive and insignificant effect on development in Java, economic openness in terms of export value has a positive and significant effect on development in Java. the economy in terms of investment value has a negative and insignificant effect on development in Java, the human development index has a negative and significant effect on development in Java, the level of impact has a negative and significant effect on development in Java.

Keywords: Development Inequality, Fiscal Decentralization, Economic Growth, Economic Openness, HDI, Unemployment Rate

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia (Todaro dan Smith, 2003). Sebagaimana ditunjukkan oleh Sumodiningrat (2001) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah kemajuan struktural dari langkah-langkah perubahan yang mendasar yang dilakukan tanpa henti dan saling berkaitan. Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang menyoroti perbaikan pembangunan pada pembangunan ekonomi karena dapat mempengaruhi berbagai bidang lain seperti sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Pembangunan ekonomi nasional dilatar belakangi oleh perubahan dari pembangunan ekonomi regional yang semakin meningkat. Pembangunan ekonomi nasional berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah. Sesuai dengan pernyataan Lincoln Arsyad (2010) bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah interaksi dimana pemerintah setiap daerah dan rakyatnya menangani aset-aset yang ada dan membuat organisasi pemerintah dengan pihak swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan dan mendorong perubahan dalam kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut.

Meskipun demikian, suatu negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi, tidak berarti bahwa negara tersebut memiliki pembangunan ekonomi yang besar. Pasalnya pemerintah hanya menyoroti pada peningkatan perkembangan ekonomi, tanpa melihat dampak lain yang menyebabkan peningkatan perbedaan pembangunan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan pembangunan adalah kejadian umum yang terjadi dalam peningkatan perekonomian pada suatu daerah.

Melalui strategi kebijakan otonomi daerah agar dapat memberikan efek positif yang mempengaruhi daerah, yang terkhusus untuk meningkatkan perkembangan dan pembangunan perekonomian dengan asset-aset yang dapat diolah di daerah. Namun, kenyataan di lapangan semua tergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengelola dana secara efektif, kerangka peraturan yang masih buruk, dan realokasi yang rendah antar wilayah dalam satu wilayah, hal ini akan menghambat perkembangan perekonomian dan pembangunan perekonomian daerah, bahkan meningkatkan ketidaksetaraan antar daerah.

Menurut Banendro (2016) ada empat komponen yang memengaruhi hasil dari pembangunan daerah yaitu adanya perbedaan potensi asset yang terdapat pada daerah, kontribusi mitra (masyarakat, pengusaha, dan investor), kontras dalam SDM, dan kapasiitas pemerintah daerah dalam menangani perekonomian. Namun, dengan terjadinya keberhasilan pembangunan daerah, tidak berarti bahwa tidak adanya ketimpangan daerah di daerah tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa komponen, antara lain: bedanya aset-aset alam, bedanya keadaan demografis, terhambatnya aktivitas produk dan tenaga kerja, terpusatnya aktivitas ekonomi, dan alokasi keuangan pembangunan.

Petunjuk dari terbukanya perekonomian terdiri dari strategi pengaturan komoditas ekspor, strategi substitusi impor, dan strategi peningkatan modal. Perdagangan adalah aktivitas di bidang perekonomian yang memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan perekonomian serta pemerataan dan dapat memberikan donasi yang berarti dalam menciptakan lapangan bisnis serta dapat memperluas kesempatan pekerjaan dan dapat meningkatkan upah (Sood 2011). Aktivitas perdagangan dan investasi diterima untuk berperan dalam

mendorong perkembangan ekonomi daerah dan dapat membuat dampak pengganda yang besar melalui pemanfaatan aset-aset yang ideal dan barter hasil produksi antar daerah. Perdagangan dan investasi juga dapat menjadi pendorong utama bagi perekonomian daerah dan menambah kemakmuran masyarakatnya di wilayah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi atau SDM pada suatu daerah dapat mempengaruhi ketidakmerataan pembangunan wilayah. Hal ini karena SDM yang unggul dapat memengaruhi tingkat efisiensi masyarakat di berbagai bidang pada aktivitas ekonomi dan juga dapat meningkatkan tingkat upah masyarakat di suatu daerah. Sehingga dapat membangun perubahan pembangunan. Padahal, jika suatu daerah memiliki tingkat SDM yang kecil, maka akan menyebabkan keterlambatan pembangunan.

Ada faktor lain yang memengaruhi ketimpangan pembangunan daerah yaitu tingkat pengangguran yang terdapat pada suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pengangguran pada suatu daerah, maka tingkat produktifitas semakin menurun dan juga menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sementara daerah yang tingkat penganggurannya turun terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan. Pengangguran juga dapat menyebabkan dampak yang lain bagi kehidupan sosial

yaitu tingkat kriminalitas dan kekerasan. Hal ini dapat memengaruhi kepada stabilitas dan pembangunan ekonomi yang menjadi lambat serta tingkat kesejahteraan semakin menurun.

Permasalahan ketimpangan belum juga dapat teratasi di Indonesia, meskipun masyarakat Indonesia sudah lama merdeka. Meskipun Pulau Jawa adalah pusat perekonomian Indonesia, tidak mengesampingkan kemungkinan ketimpangan juga akan terjadi antara Pulau Jawa itu sendiri di mana ketimpangan akan melebar jika tidak ada pemerataan pembangunan. ketimpangan pembangunan yang ada di seluruh Provinsi di Pulau Jawa sesuai dengan perhitungan Indeks Williamson termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Dalam menekan ketimpangan pembangunan antar wilayah diharapkan kepada pemerintah daerah agar mampu mengelola semua sumber daya secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa banyak permasalahan yang mampu memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis kondisi tersebut dengan judul penelitian “Analisis Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional Terhadap Ketimpangan

Pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
3. Menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
4. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
5. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemajuan di bidang ekonomi, serta perubahan-perubahan dalam jangka panjang. Muncul definisi yang lebih memberatkan kepada peningkatan

pendapatan perkapita di suatu daerah. Definisi tersebut memberatkan kepada tingkat kemampuan suatu wilayah dalam peningkatan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2010).

Ketimpangan Wilayah

Menurut Sjafrizal (2012) mengungkapkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan terjadi dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Desentralisasi Fiskal

Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. (Amir Arham, Muhammad, 2019)

Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Hal tersebut diungkapkan juga oleh Sukirno (2011) yang

mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi menunjukkan bahwa hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan yang berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Keterbukaan ekonomi berakibat pada terbukanya akses perdagangan (trade openness) dan permodalan luar negeri (financial openness). Keterbukaan ekonomi memberikan keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui perdagangan yaitu terbukanya akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Keterbukaan ekonomi melalui perdagangan internasional dapat dilihat dari dua komponen yaitu ekspor dan impor (Nopirin, 1999: 239).

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya. IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dalam teori indeks pembangunan manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Tingkat Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Muhammad Fajrii, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar (2016) dengan judul “Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera”. Kajian ini bertujuan untuk membedakan pengaruh otonomi fiskal, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan daerah, dan ketimpangan daerah di wilayah-wilayah di Sumatera. Eksplorasi ini menggunakan teknik analisis data panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil mengklarifikasi bahwa otonomi fiskal tergolong rendah, pertumbuhan ekonomi di Sumatera selama kerangka waktu peninjauan juga rendah, akses terbuka di Sumatera belum terbuka untuk

pertukaran, Dampak otonomi fiskal terhadap ketidakerataan adalah negatif dan signifikan. pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan negatif dan signifikan, sedangkan akses keterbukaan positif dan tidak signifikan terhadap disparitas. Dipercaya bahwa pemerintah Sumatera dapat memanfaatkan pendapatan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi harus fokus dan mengendalikan tingkat ketidakmerataan. Harus ada dorongan ke regional untuk lebih dinamis di Sumatera atau negara.

Penelitian oleh Liling Vera Yusica, Nazaruddin Malik, Zaenal Arifin (2018) berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur”. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji disparitas wilayah dan menyelidiki dampak faktor pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan lokal di wilayah Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan teknik kuantitatif dan menggunakan analisis regresi data panel. Dilihat dari penelusuran PDRB per kapita, tingkat ketimpangan wilayah di Wilayah Kalimantan Timur sebenarnya menunjukkan disparitas lokal yang tidak berdaya dengan alasan bahwa menunjukkan angka negatif. Dari hasil kajian cenderung ditegaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi

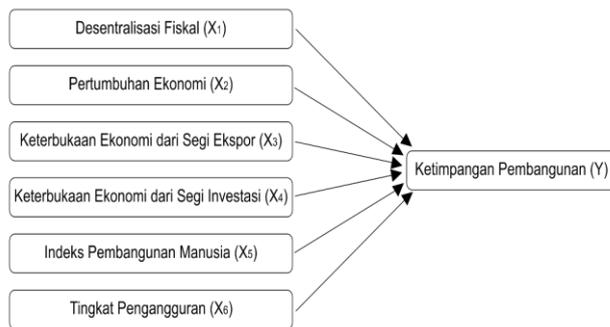
berpengaruh negatif besar terhadap ketimpangan wilayah dan variabel aglomerasi serta tingkat pengangguran berpengaruh positif dan besar terhadap disparitas regional.

Penelitian oleh Achmad Tjahja Nugraha dan Gunawan Prayitno (2020) berjudul *Regional Disparity in Western and Eastern Indonesia*". Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola perbedaan wilayah di Indonesia tahun 2007-2015 dan komponen yang mempengaruhinya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mendorong agar perbedaan tersebut dapat dikurangi dengan pendekatan kemajuan yang tepat di Indonesia. Strategi analisis menggunakan dua metodologi yaitu analisis secara spesifik dengan korelasi grafis dan analisis regresi panel dengan model fixed-effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di Barat lebih tinggi daripada disparitas di Timur. Akibat dari hasil penelitian ditemukan perbedaan variabel-variabel yang berdampak ketidakmerataan di Wilayah Indonesia Bagian Barat (WIB) dan Wilayah Indonesia Bagian Timur (WIT). Ekspansi penyebaran listrik dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pada WIB. Sementara itu, pembangunan fasilitas jalan telah memperluas ketimpangan WIB. Ada pandangan bersama dengan berbagai kualitas bahwa tingginya penanaman modal

dapat berperan mengambil bagian dalam mengurangi ketidakmerataan antar regional. Penelitian oleh Syaripuddin, Baharuddin Semmaila, dan Aminuddin (2021) berjudul "Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia". Kajian ini diarahkan pada poin-poin: (1) Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi (2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi (3) Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi (4) Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. Kajian ini menggunakan informasi tambahan yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), informasi yang digunakan dari tahun 2010 hingga 2019. Informasi tersebut menggunakan Indeks Entropy Theil dan Regresi Panel dengan data *time series* selama 10 tahun dan data *cross section* 6 wilayah di Pulau Sulawesi. Efek samping dari tinjauan ini menunjukkan bahwa selama jangka waktu eksplorasi 2010-2019, terdapat kesenjangan kemajuan yang tidak cukup besar berdasarkan Indeks Entropy Theil. faktor aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, investasi, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-

sama mempengaruhi disparitas kemajuan perekonomian antar wilayah di Pulau Sulawesi. faktor aglomerasi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh besar, sedangkan investasi dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh besar terhadap disparitas perkembangan perekonomian antar wilayah di Pulau Sulawesi.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Melaporkan suatu keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Tujuan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa. Faktor-faktor tersebut yang dijadikan variabel yang digunakan dalam

penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi yang terdiri dari Ekspor dan Investasi, IPM, dan Tingkat Pengangguran

Definisi Operasional Variabel

1. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai ketimpangan wilayah dalam penelitian ini menggunakan indeks Williamson.
2. Desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa seberapa ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian. Dari perekonomian dengan kondisi kurang baik menjadi perekonomian dengan kondisi yang lebih baik atau suatu proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang dilihat dalam bentuk pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$$

4. Dalam Penelitian ini keterbukaan akses perdagangan menggunakan nilai ekspor setiap Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan, keterbukaan permodalan luar negeri menggunakan nilai investasi setiap Provinsi yang ada di Pulau Jawa.
5. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang digunakan dalam mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah dalam tiga hal yang mendasari pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
6. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tingkat pengangguran adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan akan menjadi hasil yang diperoleh dari penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan data sekunder. Adapun data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur serta menggunakan literatur, website, dan jurnal yang sesuai sebagai sumber atau bahan kajian.

Teknik Analisis Data

Terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik perlu dilakukan uji spesifikasi model dengan cara *Chow test*, *Haustman test*, dan *Lagrange Multiplier test*. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi data panel dan kemudian dilakukan uji statistik seperti uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi parsial (t), uji signifikansi simultan (F).

Uji Spesifikasi Model

Uji Chow

Dalam Uji chow ini digunakan untuk membandingkan model yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect*

Model. Jika dalam uji chow menunjukkan nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya menunjukkan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah model FEM.

Uji Hausmant

Dalam uji haustman ini diperlukan untuk membandingkan model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Jika dalam uji haustman menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah REM. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah model FEM.

Uji Lagrange Multiplier

Dalam Uji Large Multiplier (LM) diperlukan untuk membandingkan model yang terbaik antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model*. Jika dalam Uji Large Multiplier (LM) menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah CEM. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka model yang terbaik digunakan adalah model REM.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel bebas atau variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) yang mengungkapkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \epsilon_{it}$$

- Y = Ketimpangan Pembangunan
- X₁ = Desentralisasi Fiskal Provinsi i tahun t
- X₂ = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi i tahun t
- X₃ = Ekspor Provinsi i tahun t
- X₄ = Investasi Provinsi i tahun t
- X₅ = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi i tahun t
- X₆ = Tingkat Pengangguran Provinsi i tahun t
- i = *Cross Section* (Provinsi)
- t = *Time Series* (Tahun)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ = Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

$$\beta_4,$$

$$\beta_5$$

$$\varepsilon = \text{Error Term}$$

Uji Statistik

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dan harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis regresi, karena nilai koefisien determinasi dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi terestimasi.

Uji Signifikansi Parsial (t)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel independen secara parsial. Uji t bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel independen secara individu dalam memengaruhi variabel dependen

Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan (Bersama-sama) memengaruhi terhadap variabel dependen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Jawa

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa dihitung dengan menggunakan metode Indeks Williamson. Dimana menurut Sjafrizal (2012) apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 1 maka ketimpangan yang terjadi cenderung

tinggi dan semakin menjauh dari angka 1 maka ketimpangan yang terjadi cenderung rendah.

Tabel 1. Indeks Williamson di Pulau Jawa Tahun 2010-2019

Provisi	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	0.77	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76
DKI Jakarta	0.54	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59
Jawa Barat	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
Jawa Tengah	0.71	0.83	0.70	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65
DIY	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51
Jawa Timur	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa pada tahun 2010-2019 yang dihitung melalui perhitungan Indeks Williamson terlihat bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa mengalami fluktuatif dan cenderung memiliki nilai yang tinggi yaitu mendekati angka 1, yang berarti bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa memiliki ketimpangan yang sangat tinggi.

Uji Kesesuaian Model

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.32594	(9,44)	0.961
	9		9

Cross-section	3.87258	9	0.919
Chi-square	0		6

Sumber: Eviews 11, 2021 data diolah

Berdasarkan hasil uji *Chow* pada tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas *Chi-square* bernilai 0,9447 yang berarti bahwa menyatakan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa model terbaik menurut uji *Chow* adalah *Common Effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
	3,9195	158,45	162,37
Breusch-Pagan	84 (0,0477)	68 (0,0000)	64 (0,0000)

Sumber: Eviews 11, 2021 data diolah

Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier* pada tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* (BP) bernilai 0,0000 yang berarti bahwa menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa model terbaik menurut uji *Lagrange Multiplier* adalah *Random Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

X1	X2	LnX	LnX	X5	X6
		3	4		

X1						
	1	0.381	0.756	0.447	-	0.555
		20	741	134	0.465	703
					571	
X2	0.381	1	0.303	0.177	-	0.506
	20		868	466	0.066	551
					002	
Ln	0.756	0.303		0.789	-	0.481
X3	741	868	1	825	0.494	797
					232	
Ln	0.447	0.177	0.789		-	0.169
X4	134	466	825	1	0.225	368
					335	
X5	-	-	-	-	-	-
	0.465	0.066	0.494	0.225	1	0.199
	571	00	232	335		206
X6	0.555	0.506	0.481	0.169	-	
	703	551	797	368	0.199	1
					206	

Sumber: Eviews, 2021 data diolah

Berdasarkan tabel 5. yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas memiliki nilai korelasi antar variabel independent lebih kecil dari 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini model terpilih adalah *Random Effect Model*. Oleh sebab itu tidak dapat menggunakan uji heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan pada *Random Effect Model* telah menggunakan metode GLS.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji kesesuaian model diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$Y = 0,848916 + 0,001610X_1$		C	2.229010	0.0301
$+ 0,039302X_2$		X1	0.885682	0.3798
$+ 0,043213LnX_3$		X2	1.643888	0.1061
$- 0,000960LnX_4$		LnX3	2.019062	0.0486
$- 0,017172X_5$		LnX4	-0.082928	0.9342
$- 0,027546X_6$		X5	-5.601279	0.0000
		X6	-4.716418	0.0000

Y :Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

X₁ : Desentralisasi Fiskal

X₂ : Pertumbuhan Ekonomi

LnX₃ : Keterbukaan Ekonomi dari segi Ekspor

LnX₄ : Keterbukaan Ekonomi dari segi Investasi

X₅ : Indeks Pembangunan Manusia

X₆ : Tingkat Pengangguran

Sumber: *Eviews 11, 2021 data diolah*

Nilai tabel t yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,00575 dengan *degree of freedom* (df) = 60-7= 53 dan taraf signifikansi 95% (α=5%). Berdasarkan hasil dari uji t-statistik maka dapat dijelaskan bahwa

- a. Desentralisasi fiskal memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,885682 < 2,00575 dengan nilai probabilitas sebesar 0.3798 lebih besar dari nilai taraf signifikansi α=5%, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
- b. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 1.643888 < 2,00575 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1061 lebih besar dari nilai taraf signifikansi α=5%, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan

Uji Statisitik

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel *Random Effect* diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,690032 yang menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran sebesar 69,00% sedangkan 31,00% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam model regresi.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil uji t-statistik

Variable	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	-------

pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

- c. Keterbukaan ekonomi dari segi ekspor memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2.019062 > 2,00575$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0486 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi $\alpha=5\%$, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan ekonomi dari segi ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Keterbukaan ekonomi dari segi investasi memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $-0.082928 > -2,00575$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.9342 lebih besar dari nilai taraf signifikansi $\alpha=5\%$, dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan ekonomi dari segi investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.
- d. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-5.601279 < -2,00575$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi $\alpha=5\%$, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan

antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

- e. Tingkat Pengangguran memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-4.716418 < -2,00575$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi $\alpha=5\%$, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	22,89032
(F-statistic)	0,000000

Sumber: *Eviews 11, 2021 data diolah*

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar $22,89032 > 2,28$ yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa di Pulau Jawa tahun 2010-2019.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi diatas maka dapat diketahui bahwa variabel keterbukaan ekonomi dari segi ekspor, indeks pembangunan manusia, dan tingkat

pengangguran secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa. sedangkan variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi dari segi investasi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa.

Pengaruh Desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosdyana (2015) yang menyatakan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan, yang artinya desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dapat merata namun pada saat tertentu ketimpangan akan menurun. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang efektif untuk menekan angka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa. Dalam sistem otonomi diharapkan daerah lebih intensif untuk memajukan darahnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan

untuk pembangunan ekonomi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa mengenai desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat disimpulkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi tidak secara signifikan

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. hasil penelitian ini sesuai dengan Regita Dita Zusanti (2020) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan.

Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan.

Pengaruh Keterbukaan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa

Ekspor

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterbukaan ekonomi dalam segi ekspor selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2018) yang menunjukkan bahwa variabel keterbukaan ekonomi dalam segi ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Semakin tinggi nilai ekspor maka perekonomian suatu daerah akan semakin terbuka banyak kegiatan perekonomian hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Meningkatnya mutu dan kualitas produksi unggulan seperti barang-barang yang dapat memberikan keuntungan absolut dan komparatif yang akan meningkatkan pembangunan di setiap Provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Investasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterbukaan ekonomi dalam segi investasi selama kurun

waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mela Apriani Damayanti (2019) yang menunjukkan variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah dengan nilai probabilitas sebesar 0,6183. Walaupun investasi yang tinggi dan merata akan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya alam dan faktor produksi serta meningkatkan pendapatan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan investasi yang ada di Pulau Jawa belum memberikan hasil yang maksimal untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.

Pengaruh indeks pembangunan manusia dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Septiani Dwi Kusuma (2019) yang menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian

yang dilakukan oleh Nita Tri Hartini (2017) yang menunjukkan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menjadikan bahwa dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, seperti pendidikan formal yang ditempuh semakin tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Sehingga mampu menekan angka ketimpangan pembangunan.

Pengaruh tingkat pengangguran dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqidatul Izza (2019) yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dengan nilai probabilitas sebesar 0,026. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Reza Maulana Dwiputra (2018) yang menunjukkan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan dengan nilai probabilitas 0,0466.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Pangaribowo (2017) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan sebagian para tenaga kerja di Pulau Jawa bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, akan tetapi pemerataan tersebut terjadi pada kelas perekonomian tingkat bawah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang efektif untuk menekan angka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Pertumbuhan ekonomi baik

secara langsung maupaun tidak langsung akan mempengaruhi masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah.

3. Variabel keterbukaan ekonomi dari segi ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Hal ini dikarenakan meningkatnya mutu dan kualitas produksi unggulan seperti barang-barang yang dapat memberikan keuntungan absolut dan komparatif yang akan meningkatkan pembangunan di setiap Provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Variabel keterbukaan ekonomi dari segi investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Walauapun investasi yang tinggi dan merata akan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya alam dan faktor produksi serta meningkatkan pendapatan. Investasi belum bisa berpengaruh secara optimal untuk menurunkan angka ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa

4. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang berpendidikan tinggi akan memiliki produktivitas yang tinggi dan mendapat upah yang lebih tinggi juga. Hal ini membuat ketimpangan pembangunan antar daerah menurun
5. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Hal ini dikarenakan sebagian para tenaga kerja di Pulau Jawa bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, akan tetapi pemerataan tersebut terjadi pada kelas perekonomian tingkat bawah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi daerah agar mampu mengoptimalkan instrumen pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu di dorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola potensi sehingga mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka ketimpangan di daerah tersebut menjadi menurun.
2. Pemerintah daerah meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan tidak lupa memperhatikan aspek-aspek yang lain lain seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, dan lain sebagainya. Dengan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi maka pembangunan daerah akan meningkat sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dengan daerah yang lainnya
3. Dengan adanya peningkatan keterbukaan ekonomi dalam segi ekspor maka perlu di perkuat dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan memberikan kebijakan stimulus pada industri hilir untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk. Pemerintah juga perlu merancang kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan penduduk miskin dalam kegiatan ekspor dan impor.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkenalkan sumber daya yang ada di setiap wilayah provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan baik dan akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh investor asing karena ketertarikan dengan sumber daya yang ada di setiap wilayah.
4. Pemerintah daerah terus meningkatkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia seperti kualitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

5. Perlunya perluasan lapangan pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyerap para tenaga kerja dan juga perlunya melaksanakan pelatihan kerja kepada para tenaga kerja agar lebih siap dalam dunia kerja sehingga upah yang diterima sesuai dengan kemampuan yang dimiliki para tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah karena kesejahteraan masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Arham, M. (2019). *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Artaningtyas, W. D., & Sriwinarti, A. (2020). The influence of fiscal decentralization, economic growth, and economic openness on the inter-provincial development disparity on Java 2001-2017. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 15(2), 100–115. Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id>
- Banendro, S. D. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- BPS Provinsi Banten. Retrieved January 20, 2020, from <https://banten.bps.go.id/>
- BPS Provinsi Jawa Barat. Retrieved January 20, 2020, from <https://jabar.bps.go.id/>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved January 20, 2020, from <https://jakarta.bps.go.id/>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. Retrieved January 20, 2020, from <https://jateng.bps.go.id/>
- BPS Provinsi Jawa Timur. Retrieved January 20, 2020, from <https://jatim.bps.go.id/>
- BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved January 20, 2020, from <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Damayanti, M. A. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id>
- Dita Zusanti, Regita. Sasana, Hadi. Rusmijati (2018). Analisis pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *Journal of Economic* Volume, 2(1), 602–615.
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2). Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id>
- Fajrii, M. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99–107
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5th ed.; R. C. Mangunsong, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartini, N. T. (2015). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah

- di provinsi diy tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Iqbal, M. (2018). Pengaruh Ekspor dan Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Ketimpangan Wilayah di Indonesia. Retrieved from <http://repository.unp.ac.id>
- Izza, A. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional di kabupaten toli-toli provinsi sulawesi tengah*. Retrieved from <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusuma, Dewi Septiani Dwi. Sarifah, Dwi Sudati. & Septiani, Yustirania . (2019). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb), inflasi, dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap ketimpangan pendapatan di daerah istimewa yogyakarta tahun 2011-2017. *Journal of Economic*, 1(3), 282–293.
- Muhammad, S. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nopirin. (1999). *Ekonomi Internasional* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Normalitasari, L. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Tenaga Kerja Industri Kreatif Kerajinan Batik Kayu di Kec Krebet Bantul Provinsi DIY. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Noto, G. H. (2016). *Analisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014*. 4(2), 11.
- Nugraha, Achmad Tjahja. & Prayitno, Gunawan. (2020). Regional Disparity in Western and Eastern Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(4), 101–110
- Rahardjo, Adisasmita. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosdyana, Dewi. (2015). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan di pulau jawa tahun 2009-2013. *Jurnal prosding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Arsitektur & Sipil)*.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI.
- Sukirno, Sadono. (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2001). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Syaripuddin. Semmaila, Baharudin, & Aminuddin. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi. *Jurnal ilmu ekonomi*,

4(1)

Thofan, Mochamad. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1). Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id>

P., Todaro M. dan C., Smith Stephen (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Jakarta: Erlangga.

Yusica, L. vera, Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 230–240